

No. 192 Februari 2022

BaKTI**News**

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**PERLINDUNGAN ANAK
DI DESA**

**MEMPERCEPAT PENURUNAN
ANGKA STUNTING**

**KEBERLANJUTAN SINERGI
PERENCANAAN DAN SIO PAPUA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

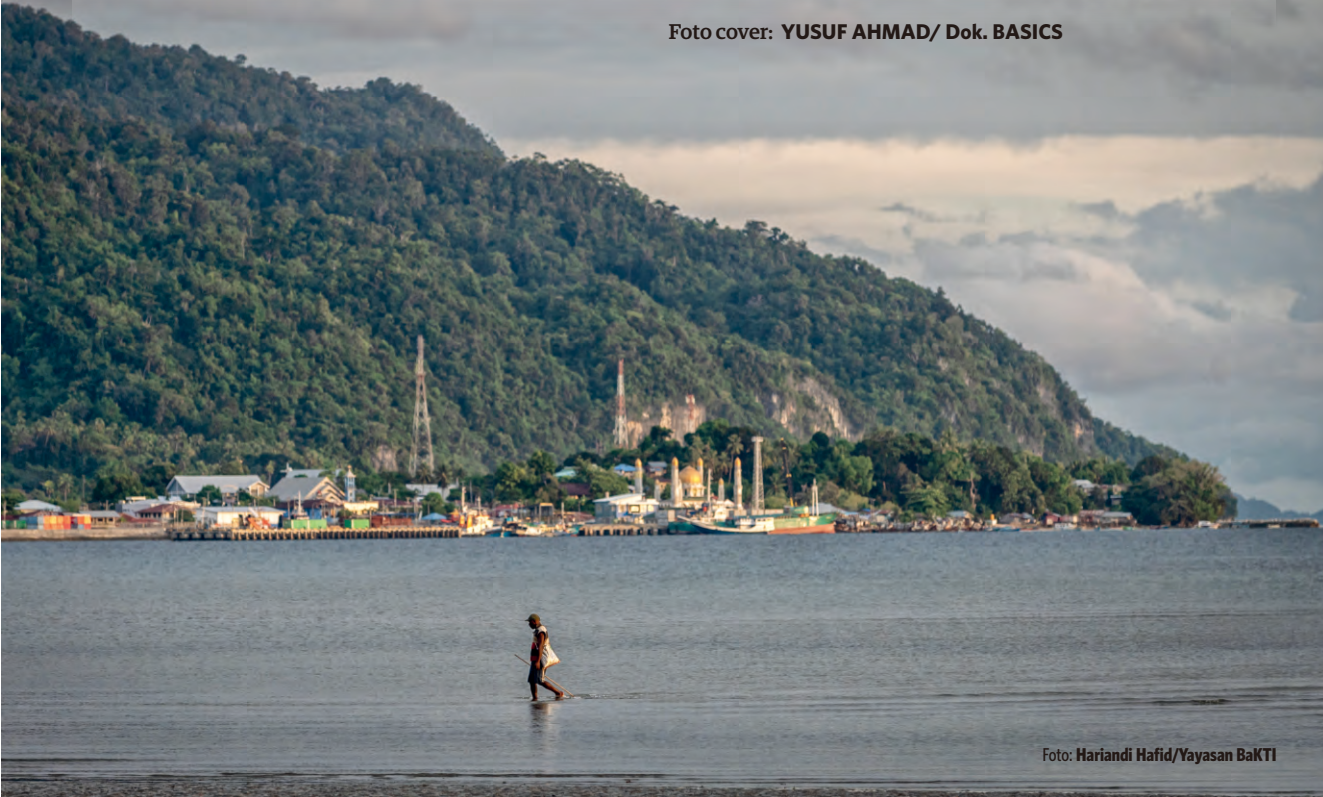
BaKTINews

Februari 2022

No. 192

- 1** Perlindungan Anak di Desa
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
& **ANDI NURLELA**
- 5** Mewujudkan Sekolah yang Dapat
Menggali Potensi Anak
Berkebutuhan Khusus di Indonesia
- 9** Mempercepat Penurunan Angka
Stunting
Oleh **NUR WAHIDAH, SE, MM**
- 13** Keberlanjutan Sinergi Perencanaan
dan SIO Papua
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 19** Tak Hanya Ramah Lingkungan,
Pariwisata Ramah Perempuan, Sudah
Kah?
Oleh **GRACE LUMBAN GAOL**
- 22** Temui Manusia Pembalut dari Papua
yang Mendobrak Tabu dan
Mengubah Kehidupan
Oleh **REZA HENDRAWAN**
- 25** Sepak Terjang Peneliti Muda Indonesia:
Berkembang Pesat Tapi Masih
Terbentur Banyak Tantangan
Oleh **MIZAN BUSTANUL FUADY BISRI**
- 29** Satu Data Indonesia (SDI) Terganjil
Keberagaman, Disintegrasi dan
Egosektoral Sumber Data
Oleh **NURHADI PRASETYO ST & AYU PUTU
EKA NOVITA SP, MM**
- 33** Manusia adalah Kunci Melawan Krisis
Iklim
Oleh **SAKINAH UMMU HANIY,
DEWI R. SARI & MUHAMAD RIZKI**
- 37** Membincang Kembali Toleransi dan
Intoleransi
Oleh **REYNALDI ADI SURYA**
- 40** Diskusi *Online Live* di
Instagram Story @infobakti
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto cover: **YUSUF AHMAD/ Dok. BASICS**



PERLINDUNGAN ANAK DI DESA

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.
& **ANDI NURLELA**

Sampai tahun 2000, hampir tidak ada pembicaraan mengenai masalah anak di desa atau kampung. Media cetak dan elektronik saat itu lebih banyak menyoroti permasalahan anak di kota-kota besar, terutama anak jalanan, pekerja anak, dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang jumlahnya terus meningkat.

Beberapa studi (Irwanto, 1995; Joni, 1997; Irwanto et al., 1999) mengonfirmasi bahwa permasalahan anak di kota-kota besar juga dikontribusi oleh urbanisasi yang dilakukan penduduk desa ke kota dan bekerja di sektor informal. Studi mengenai pekerja anak atau buruh anak (*child labour*) membuktikan bahwa pelibatan anak dalam pekerjaan yang eksploitatif, upah rendah, dan pekerjaan yang berbahaya, seperti di perkebunan, jermal, dan berbagai industri, juga menarik dan melibatkan anak-anak dari desa (Tjandraningsih et al., 1992; Huriuci, 1996; White & Tjandraningsih, 1998).

Itu berarti, sudah sejak lama permasalahan anak di desa muncul di permukaan, apalagi desa-desa yang dekat dengan kota, dan yang paling menonjol adalah pekerja anak. Namun, moral pengasuhan dan perlindungan anak yang masih



konvensional dan tradisional, menganggap bahwa pelibatan anak dalam pekerjaan, termasuk pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya, adalah tradisi atau proses mewariskan keahlian oleh orang tua kepada anak. Anak yang bekerja pada pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya dianggap sebagai pembelajaran.

Pekerja anak di manapun acapkali mendapat perlakuan yang tidak wajar, yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini akibat lemahnya posisi anak yang sering dianggap sebagai objek. Dalam perspektif sosio-psikologis,



Foto: Yayasan BaKTI

lingkungan pekerjaan tempat anak-anak dipekerjakan dihipotesiskan sebagai bukan lingkungan pendidikan atau media pembelajaran yang layak bagi anak. Lingkungan pekerjaan anak menjadi lingkungan yang tidak representatif untuk menyokong proses pematangan intelektual dan kepribadian anak. Lingkungan ini memendekkan proses pendewasaan diri anak dan membuat tersumbatnya ruang-ruang positif bagi pengaktualisasian diri anak dan bagi perkembangan jiwanya (Ikhsan, 1998; Kordi, 2015).

Jika seorang anak perempuan menjadi pekerja anak, maka pekerja anak perempuan tersebut

menghadapi situasi yang lebih kompleks dan lebih buruk. Selain menghadapi lingkungan kerja orang dewasa, yang memungkinkan dieksploitasi sebagaimana pekerja anak laki-laki, pekerja anak perempuan juga menghadapi berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual dalam bentuk verbal, psikis, dan fisik (Kordi & Sibala, 2009; Kordi, 2015).

Perubahan Sosial dan Perlindungan Anak

Pekerja anak perempuan juga menghadapi risiko perkawinan anak lebih besar. Pendidikan yang rendah dan menikah di umur yang terlalu



muda, menyebabkan mereka melahirkan anak terlalu banyak, sementara ibu-ibu muda ini tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak, akhirnya mereka menjadi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak semakin meningkat dan meluas sampai ke desa-desa terpencil, seiring dengan perubahan sosial dalam teknologi komunikasi dan informasi yang menarik masyarakat desa ke dalam dunia maya atau dalam jaringan (daring). Anak-anak di pedesaan tidak hanya menjadi korban kekerasan yang selama ini dikenal sangat konvensional, seperti kekerasan fisik, tetapi juga menjadi korban kekerasan berbasis jaringan atau siber (*cyber crime*), kekerasan di dunia maya (*cyber violence*), atau kekerasan secara virtual.

Di sisi lain, moral pengasuhan dan perlindungan anak telah berubah sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002, diubah dengan UU No. 35/2014, diubah lagi dengan UU No 17/2016). Penggunaan kekerasan dalam pengasuhan atau cara mendidik adalah pelanggaran hak anak dan tindak pidana. Pelibatan anak dalam pekerjaan yang eksploitatif adalah kekerasan terhadap anak. Demikian juga perkawinan anak menjadi terlarang setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16/2019) yang mengubah usia perkawinan menjadi 19 tahun.

Memperkuat Kelembagaan

Perubahan sosial yang sangat cepat menempatkan anak-anak di desa ke dalam kondisi rentan dan berisiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Sementara perubahan moral pengasuhan dan perlindungan anak menempatkan orang tua dan pengasuh rentan menjadi pelaku kekerasan dan berisiko melanggar hak anak, melanggar hukum dan melakukan pidana.

Untuk itu, diperlukan pembentukan dan penguatan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa, yang akan memberikan layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Lembaga semacam PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Puskesmas (Pusat kesejahteraan sosial), *Shelter* Warga, dan sebagainya yang telah dibentuk di beberapa desa adalah contoh yang dapat dirujuk untuk pengembangan kelembagaan perlindungan anak di desa.

Lembaga yang ada perlu mengembangkan mekanisme dan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat di desa untuk penanganan anak-anak yang menjadi korban, dan pencegahan kekerasan melalui promosi hak-hak dan perlindungan anak, termasuk mengenalkan model-model pengasuhan dan pendidikan anak tanpa kekerasan.

Yayasan BaKTI atas dukungan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) melalui Program Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak (*Strengthening Safe and Friendly Environment for Children-SAFE4C*) membentuk dan menguatkan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Kota Makassar.

Perencanaan & Penganggaran Berbasis Hak Anak

Program tersebut mulai menyiapkan dan memperkuat sumber daya manusia di tingkat desa, yang terdiri dari fasilitator masyarakat, pemerintah desa, dan fasilitator anak sebagai pionir dalam perlindungan anak. Pelatihan dan diskusi dilakukan mengenalkan dan meningkatkan kapasitas tenaga yang menjadi pionir, di antaranya mengenai hak dan perlindungan anak, pengasuhan anak, kekerasan, gender, dan SOP layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Program juga memfasilitasi pembentukan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa sesuai kebutuhan: PATBM, Puskesmas, *Shelter* Warga, atau nama lain, yang kemudian diperkuat, baik instrumen kelembagaan, penyusunan SOP layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang akan digunakan, maupun penguatan dan keterampilan tenaga layanan untuk menjadi tenaga yang memenuhi standar penanganan korban.

Mereka yang disebut sebagai pionir ini dalam perjalanan selanjutnya akan menjadi orang-orang yang dapat memengaruhi dan mengadvokasi perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, sehingga melahirkan perencanaan dan penganggaran berbasis hak anak. Perencanaan tersebut bukanlah perencanaan baru, bukan juga perencanaan terpisah dari perencanaan dan penganggaran yang sudah ada, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu-isu hak dan perlindungan anak ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan menerjemahkan komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perencanaan dan penganggaran berbasis hak anak atau responsif hak anak atau anggaran memihak/pro anak terdiri atas seperangkat alat/instrumen dampak belanja dan penerimaan pemerintah desa terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di desa.

Peraturan Desa

Agar perencanaan dan penganggaran berbasis hak anak di desa menjadi komitmen yang nyata, dan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di desa, maka perencanaan dan penganggaran tersebut perlu dituangkan dalam instrumen hukum tertinggi di tingkat desa, dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Perdes adalah instrumen hukum yang dibentuk kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sementara lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada kepala desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan Raperdes (Rancangan peraturan desa).

Perdes yang dibentuk disesuaikan dengan permasalahan anak yang paling dominan di desa, serta dapat memprediksi dan mengantisipasi permasalahan anak dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah dan masyarakat desa dapat membuat Perdes mengenai Pencegahan Perkawinan Anak, Perdes Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Perdes Perlindungan Anak, Perdes Desa Ramah Anak dan sebagainya.

Dengan adanya Perdes, maka perlindungan anak di desa mempunyai landasan dan pedoman, yang menjadi panduan dan pegangan bersama bagi pemerintah dan masyarakat desa. Perdes akan mengarahkan tahap-tahap pelaksanaan perlindungan anak, baik pencegahan, penguatan kelembagaan, penanganan korban, dan peningkatan kapasitas tenaga layanan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Kerja Sama Unicef - BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG DAPAT MENGGAJI POTENSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA

A

ndi, seorang anak berusia enam tahun yang tinggal di Kabupaten Bireuen, Aceh, saat ini bersekolah di taman kanak-kanak. Ia didiagnosis sebagai anak berkebutuhan khusus saat masih kecil.

“Saya sudah mencari-cari banyak sekolah, tetapi belum menemukan satupun sekolah yang membuat saya merasa nyaman untuk melepas anak saya belajar di sana,” kata Nanda, ibu Andi.

Pada suatu hari, seorang dokter anak merekomendasikan Nanda untuk memasukkan putranya ke taman kanak-kanak di Bireuen yang menyediakan kelas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Taman kanak-kanak ini menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusi. Tak butuh waktu lama bagi Nanda untuk mendapati bahwa Andi diterima sebagaimana kepribadian dan karakternya oleh anak-anak dan komunitas orang tua di taman kanak-kanak tersebut.



“Saya sangat senang menemukan taman kanak-kanak yang berhasil menggali potensi diri Andi. Tapi sekarang, saya cemas mengenai transisinya ke sekolah dasar dan bagaimana ia akan diperlakukan nanti. Harapan saya hampir pupus untuk dapat menemukan sekolah yang memiliki sarana dan prasarana untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Nanda.

Nanda memahami bahwa bukan hanya prasarana sekolah yang perlu bersifat inklusif, tetapi juga dukungan seluruh lingkungan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa lainnya, serta orang tua adalah penting

bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Masih banyak anggota masyarakat yang belum secara terbuka dapat menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Karena itu, penting agar perbedaan anak dilihat secara lebih positif di lingkungan sekolah.

Dalam salah satu diskusi kelompok terpusat (FGD) yang diadakan secara daring oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Bank Dunia pada Bulan Maret 2021, Nanda lantang menyuarakan pendapatnya atas nama anak-anak berkebutuhan khusus, seperti putranya.



Foto: **Envato**

“Saya adalah orang tua dari anak yang akan bersekolah di sekolah dasar. Saya berharap pemerintah membantu menciptakan sekolah dengan lingkungan yang dapat menerima dan mendukung anak saya maupun anak berkebutuhan khusus lainnya,” katanya.

Sayangnya, masih banyak orang tua lain yang sama seperti Nanda, memiliki kekhawatiran terhadap anaknya.

Tantangan mendidik anak berkebutuhan khusus

Di Indonesia, hampir 30 persen anak berkebutuhan khusus masih belum memiliki akses kepada pendidikan. Bahkan jika mereka masuk ke sekolah dasar, ada beberapa di antaranya tetap tinggal di kelas yang sama selama bertahun-tahun. Atau, walaupun mereka dapat naik kelas, pada akhirnya putus sekolah karena kurang memadainya pelatihan guru dan sistem sekolah untuk mengakomodasi

pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus.

Kemendikbudristek telah mendorong penerapan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Jumlah sekolah inklusi meningkat dari 3.610 menjadi 28.778 antara tahun 2015 dan 2020. Namun, hanya kurang dari 13 persen dari sekolah-sekolah inklusi tersebut yang memiliki guru terlatih dan siap memberikan dukungan pembelajaran yang memadai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kenyataannya, sekolah inklusi di Indonesia masih menghadapi banyak masalah seperti kualitas guru, fasilitas, dan mekanisme dukungan dari masyarakat.

"Kami telah menerima materi, alat, dan perlengkapan khusus untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Tapi kami tidak tahu bagaimana menggunakannya karena belum ada guru inklusi yang terlatih", tutur Mahmudin, Kepala sekolah dasar inklusi, di Bireuen, Aceh.

"Kami telah menerima materi, alat, dan perlengkapan khusus untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Tapi kami tidak tahu bagaimana menggunakannya karena belum ada guru inklusi yang terlatih"

Mahmudin

Kepala sekolah dasar inklusi, di Bireuen, Aceh.

Usulan rekomendasi kebijakan pendidikan inklusif

Bank Dunia mendukung pemerintah Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan bagi semua anak, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Melalui analisis terbaru yang didukung oleh pemerintah Australia, Bank Dunia memberikan rekomendasi kebijakan pada tiga bidang prioritas strategis.

Pertama, mendorong pemerataan akses. Ini berarti menjamin pemerataan akses ke sekolah inklusi di setiap kecamatan/kota pada setiap jenjang pendidikan, serta meningkatkan kualitas fasilitas maupun lingkungan belajar.

Kedua, meningkatkan kualitas guru dengan mengadakan pelatihan tentang pendidikan inklusif bagi semua guru, tidak hanya untuk membekali mereka dengan pengetahuan, tetapi juga untuk merangsang kemampuan berpikir. Sangat penting untuk menjalankan suatu pendampingan berkelanjutan dan dukungan rekan seprofesi kepada para guru, karena kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus yang begitu beragam dan tidak ada pelatihan tunggal yang dapat menjawab semua tantangan yang ada.

Ketiga, memperkuat tata kelola pendidikan dengan cara memperkuat sistem keuangan maupun peraturan/ perundang-undangan untuk mendukung pendidikan inklusif di tingkat nasional, daerah, dan sekolah. Perlu kolaborasi yang lebih kuat, baik antar kementerian di tingkat nasional, maupun lintas

sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial di tingkat daerah untuk memperbanyak komunitas sekolah inklusi dalam jangka panjang.

Jika pendidikan inklusif dalam makna yang sesungguhnya dapat diwujudkan akan sangat berarti bagi para orangtua seperti Nanda, sehingga anak-anak mereka dapat belajar dan memupuk potensinya seperti anak-anak lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan tersebut, saat ini Bank Dunia bersama dengan Kemendikbudristek memulai proyek percontohan kecil bertajuk *"Go Borderless!"* Ini adalah suatu program percontohan identifikasi disabilitas secara daring dan program dukungan pembelajaran berkelanjutan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di daerah tertinggal dan pedesaan di Indonesia yang didanai oleh *Inclusive Education Initiative*. Proyek percontohan yang dimulai sejak Oktober 2021 hingga Juni 2022 ini akan mendukung pengembangan sistem berbasis daring untuk mengidentifikasi anak disabilitas dengan kesulitan belajar dan mendukung pelatihan dan pembinaan kepada para guru yang akan membantu anak-anak yang didiagnosis mengalami kesulitan belajar dengan mengembangkan Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI) di 5 kabupaten yaitu Dompu, Bima, Mentawai, Bondowoso dan Lebak.

Catatan: Nama telah diubah untuk melindungi privasi



Untuk mempelajari lebih lanjut tentang asesmen lengkap dan rekomendasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, silakan mengunduh laporan Bank Dunia:

Merangkul Keberagaman dan Inklusi di Sekolah-Sekolah di Indonesia - Tantangan dan Opsi Kebijakan untuk Masa Depan Pendidikan Inklusif.

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/535361634052935364/embracing-diversity-and-inclusion-in-indonesian-schools-challenges-and-policy-options-for-the-future-of-inclusive-education>



MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA STUNTING

Oleh **NUR WAHIDAH, SE, MM**

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.

Stunting bukan hanya menjadi persoalan yang berdiri sendiri tetapi *stunting* adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang muncul, salah satunya adalah budaya dan cara perilaku hidupnya yang tidak bersih.



Foto: Yusuf Ahmad/BASICS

Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada seribu hari pertama kehidupan di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Pencegahan *stunting* dapat dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa

penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menjangkau kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting*.

Upaya percepatan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk

semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Urutan angka *stunting* tertinggi masih berada di Provinsi NTT (37,8 %) dan terendah Provinsi Bali (10,9%) sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan urutan ke 15 tertinggi (27,4%). Kurangnya Pendamping Gizi dalam penanganan *stunting* yang menyebabkan masih tingginya angka *stunting* di Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan melalui program Aksi Setop *Stunting*, tahun 2022 memberikan perhatian penurunan *stunting* di seluruh Kabupaten/Kota di Sulsel serta dengan Program GAMMARA'NA (Gerakan Masyarakat Mencegah dan Memberantas *Stunting*) sebagai salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menekan angka *stunting*.

Gerakan Masyarakat Mencegah *Stunting* (Gammara'Na) merupakan program inovasi Pemprov Sulsel dalam menekan *stunting* dengan menghadirkan pendamping pendamping gizi di wilayah Sulsel.

Para pendamping gizi ini akan melakukan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil untuk desa lokus *stunting* di 24 Kabupaten/Kota. Para pendamping juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak dalam kondisi *stunting*.

Program ini menghadirkan pendamping gizi di 40 desa di Kabupaten Bone dan 30 desa di Kabupaten Enrekang. Para pendamping bertugas memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk menanam tanaman bergizi

Upaya percepatan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen.

khususnya bagi pasangan usia subur guna. Secara spesifik, kegiatan ini berupaya menekan *stunting* dengan memberikan kapsul daun kelor, suplemen multivitamin bagi ibu hamil, PMT Balita, PMT Ibu Hamil dan Multivitamin Taburia bagi ibu hamil dan pasangan usia subur.

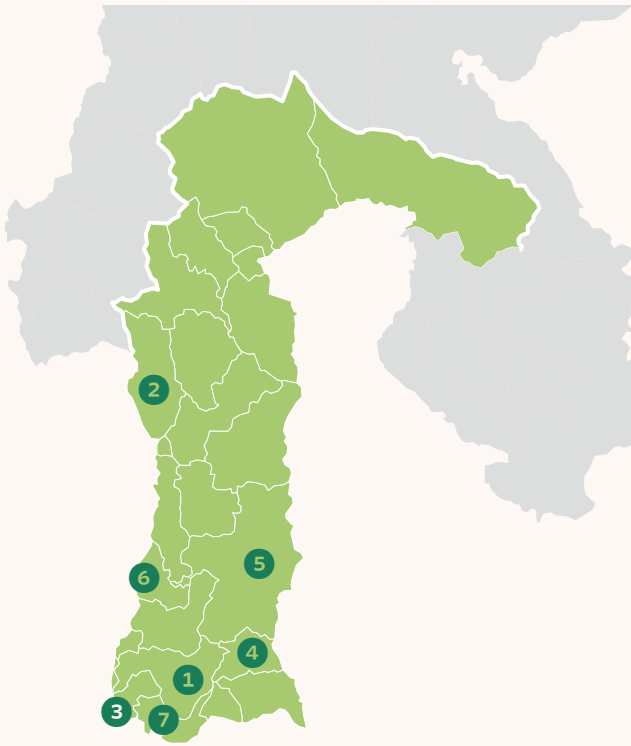
Pendamping gizi juga dilakukan sebagai upaya mengedukasi remaja putri, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita untuk membangun pola hidup sehat. Harapannya aktivitas ini dapat memberikan pengaruh dalam melahirkan generasi anak bangsa yang hebat dan membanggakan.

Angka *stunting* di Sulsel mulai mengalami penurunan signifikan hingga melampaui target pemerintah pusat. Angka *stunting* di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6 persen (Risksesda 2018), sedangkan tahun 2019 angka *stunting* menurun hingga 30,5 persen (SSGBI 2019). Pendataan SSGI Tahun 2020 tidak dilaksanakan sebab pandemi COVID-19 dan angka *stunting* tahun 2021 menurun hingga 27,4 persen.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah mendorong program Gammara'na untuk menekan angka *stunting* tersebut dan pada tahun 2021 yang menjadi Lokus *Stunting* di Provinsi Sulawesi Selatan ada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar, Kabupaten Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Bone, Wajo, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara dan Toraja Utara.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Fungsional Perencana Muda Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan



Program inovatif untuk menurunkan angka *stunting* juga telah dilakukan di berbagai kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan

1 KABUPATEN GOWA

INOVASI

AMMACA

(Amma' Caradde)

Membaca buku KIA sebelum pelayanan antenatal selama 10-15 menit.

LIONTIN

(Lembaga Informasi Terpadu Calon Pengantin)

Edukasi, skrining HIV AIDS, hepatitis, pelayanan imunisasi TT calon pengantin.

2 KABUPATEN PINRANG

INOVASI

KOLASE PRO INSTING

(Konvergensi Lintas Sektor dan Program Untuk Intervensi *Stunting*)

Perpaduan naluri untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan konvergensi.

KELAS TESI

(Tetta Siaga)

Kelas Pembelajaran yang melibatkan *Tetta* (Ayah) dalam mengawal ibu hamil sampai anak balita.

3 KABUPATEN TAKALAR

INOVASI

BERSATU HATITA

Bersama Tangani Masalah Kematian Ibu dan Pencegahan *Stunting* Bermitranya dukun, bidan dan petugas kesehatan lainnya dalam upaya penurunan AKI dan *Stunting*

MADECENG

(Masyarakat Desa Cegah *Stunting*)

Kolaborasi antara Pemerintah Desa, Unsur Masyarakat Desa (Kader PKK Desa, Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, dan KPM).

4 KABUPATEN SINJAI

INOVASI

SIBANTU LO

(Sinjai Bebas *Stunting* Dengan Daun Kelor)

Tanaman Daun kelor di tanam di pekarangan rumah masyarakat kemudian diolah menjadi obat herbal.

5 KABUPATEN BONE

INOVASI

KELAS IBU HAMIL "BOLA ASSEDIENG"

(Rumah Persatuan)

Tempat Pertemuan Ibu-Ibu Hamil dengan Petugas Kesehatan Kehamilan dan pasca melahirkan untuk menambah pengetahuan ibu Hamil tentang Kehamilan, Persalinan, Perawatan Nifas, Perawatan Bayi baru lahir. Dengan melestarikan kearifan lokal masyarakat berupa rasa persatuan.

6 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

INOVASI

SABERTING

(Sapu Bersih *Stunting*)

Kelas Gizi dan KP ASI.

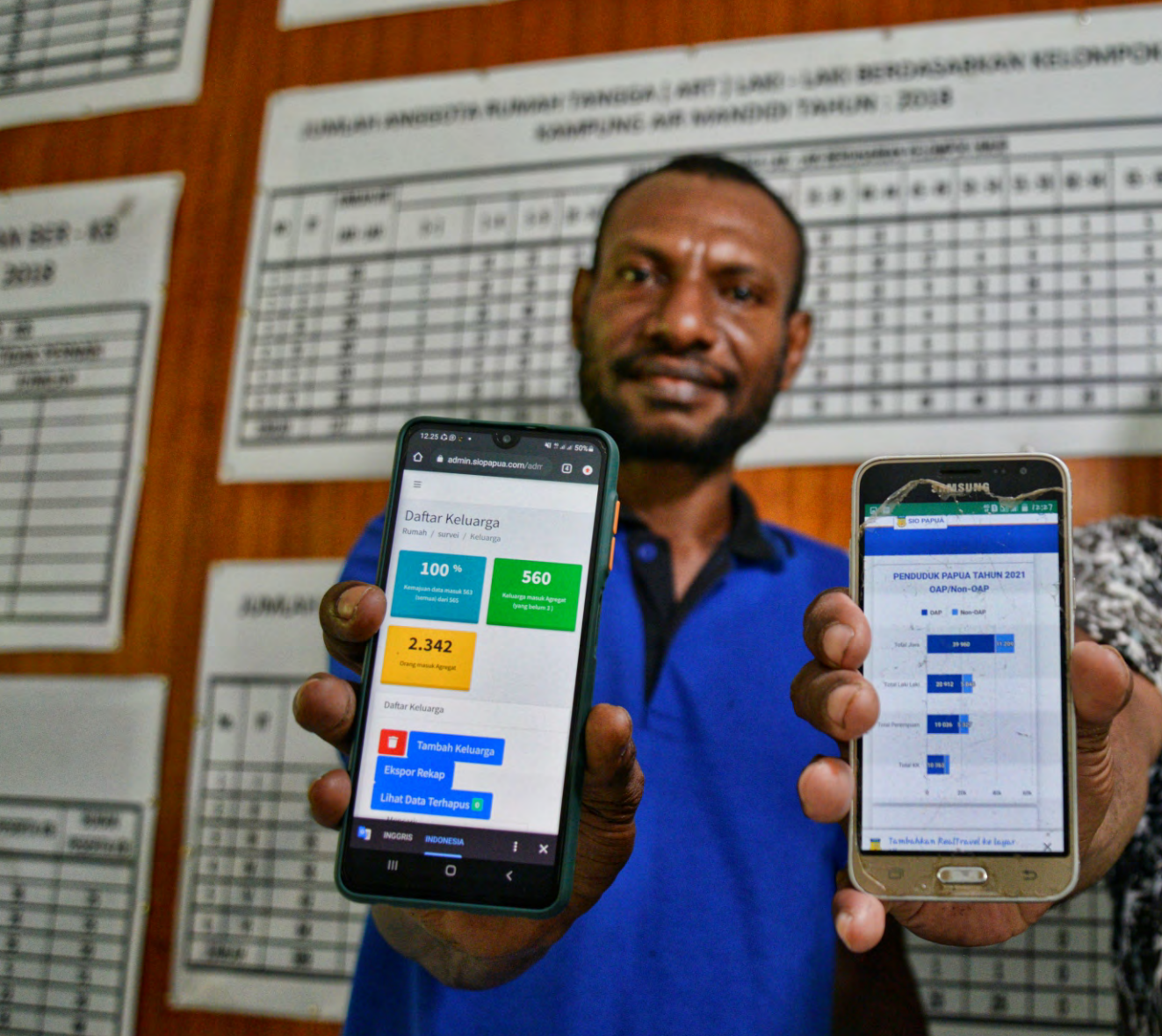
7 KABUPATEN JENEPONTO

INOVASI

JUKUCEPA'

(Kunjungi Rumahku Cegah Komplikasi Agar Persalinan Aman)

Tenaga Kesehatan dari Puskesmas mengunjungi langsung masyarakatnya yang sebagian besarnya adalah Nelayan untuk memberikan pemahaman tentang Seribu Hari Pertama Kehidupan.



KEBERLANJUTAN SINERGI PERENCANAAN DAN SIO PAPUA

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Regulasi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik perannya sebagai fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, termasuk pula dalam mengurai persoalan yang terkait dengan



Foto: Abriawan Abhe/Yayasan BaKTI

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi dalam hal ini berfungsi mengontrol atau memberikan batasan dan perlindungan hak dan kewajiban. Selain itu, regulasi juga menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama atas suatu lingkup masyarakat atau wilayah tertentu.

Di tingkat daerah, peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan

Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Peraturan daerah pun memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah; merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana peraturan daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan; sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan Kesejahteraan Daerah.

Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Selain sebagai penjabaran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat sendiri oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki. Untuk itu, keberadaan regulasi dalam bentuk peraturan



daerah dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam peraturan daerah tersebut, setiap wilayah memiliki wewenang untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Program KOMPAK-LANDASAN di Papua

Pemerintah kampung, puskesmas dan sekolah dasar adalah target-target utama dari upaya peningkatan kapasitas dalam program KOMPAK-LANDASAN dalam memastikan tercapainya tujuan besar program yaitu masyarakat miskin dan rentan di Papua memperoleh akses bagi layanan dasar yang lebih baik. Untuk itu Sejak tahun 2017, KOMPAK-LANDASAN telah memperkenalkan program sinergi perencanaan di empat kabupaten di Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel. Pada keempat kabupaten tersebut, sejumlah 13 kampung yang menjadi wilayah percobaan untuk

didampingi dalam menyusun perencanaan secara bersinergi antara kampung, dengan puskesmas dan sekolah. Melalui sinergi perencanaan, lahir program untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan dan pendidikan di kampung. Kampung dan unit layanan masing-masing mengambil peran yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah sehingga akan lebih efektif dibanding diselesaikan sendiri-sendiri serta dapat lebih cepat mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

KOMPAK-LANDASAN Fase II, melalui program Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang telah dijalankan sejak tahun 2017 pun telah menguji coba perencanaan kampung berbasis data di empat kabupaten yang sama di Provinsi Papua. Pengelolaan data penduduk kampung tersebut dilakukan oleh pemerintah kampung dengan dibantu oleh kader kampung. Proses penyiapannya diawali dengan pembentukan



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

bersinergi ini diperlukan agar kampung dan unit layanan dapat saling berbagi peran mengatasi permasalahan sehingga dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat dibanding dikerjakan sendiri. Di samping itu, keberadaan data pun diperlukan untuk menganalisa permasalahan dengan tepat dan mengatasi permasalahan secara efektif. pemanfaatan data dalam berbagai kebutuhan dan program pembangunan bukan hanya dibutuhkan di tingkat kampung melainkan juga di distrik maupun kabupaten.

Melahirkan Regulasi untuk Keberlanjutan Program

Menjelang berakhirnya program KOMPAK-LANDASAN Fase II pada tahun 2022 ini, dan untuk memastikan terlembagakannya program Sinergi Perencanaan dan SIO Papua di tingkat kabupaten, maka KOMPAK-LANDASAN mendorong lahirnya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai upaya

memastikan keberlanjutan program. Untuk itu, diawali dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara periodik di tingkat kabupaten, tim KOMPAK-LANDASAN berupaya menggali komitmen pemerintah akan pelebagaan dari model-model yang telah diimplementasikan dan peluang untuk replikasi. Di samping itu, tim KOMPAK-LANDASAN pun secara langsung mendampingi proses penyusunan regulasi yang dibutuhkan di tingkat kabupaten. Salah satunya adalah di Kabupaten Boven Digoel. Penyusunan RPJMK dan RKPK yang dilakukan secara bersinergi dengan unit layanan termuat dalam Peraturan Bupati No. 32 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMK dan RKPK Kabupaten Boven Digoel. Dengan begitu, setiap kampung di wilayah Kabupaten Boven Digoel akan menghasilkan perencanaan yang disusun secara bersinergi dengan unit layanan di wilayah mereka masing-masing.

Di samping itu, komitmen pemerintah daerah atas pelaksanaan SIO Papua di



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

kabupaten, sekaligus pelebagaan SIO Papua beserta kader kampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem satu data pun telah tampak. Salah satunya di Kabupaten Asmat yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Orang Papua yang memuat tata cara pelaksanaan SIO Papua di Kabupaten. Sekaligus pula Peraturan Bupati Nomor 73 tentang Asmat Integrasi Satu Data yang mengatur tentang pengintegrasian data di Kabupaten Asmat mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini pun menjadi peluang besar untuk pembangunan bersinergi dan berbasis data di seluruh wilayah Provinsi Papua.

“Regulasi yang didorong merupakan bagian dari proses pelebagaan model-model program KOMPAK-LANDASAN yang telah dilakukan selama ini, seperti Sinergi Perencanaan dan SIO Papua. Ketika ada regulasi maka model-model ini secara langsung akan berlanjut ketika program selesai, karena telah

merupakan bagian dari program pemerintah daerah ke depan.” Ungkap Julianus Septer Manufandu, *Provincial Manager* KOMPAK-LANDASAN untuk Provinsi Papua.

Hakikat peraturan daerah sebagai sarana untuk menampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi peraturan daerah yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Adanya regulasi yang hadir dari upaya pelebagaan model-model yang telah dikembangkan oleh program KOMPAK-LANDASAN Fase II ini diharapkan menjadi jalan bagi keberlanjutan model-model yang telah dibangun bersama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar berkualitas di Tanah Papua.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

TAK HANYA RAMAH LINGKUNGAN, PARIWISATA RAMAH PEREMPUAN, SUDAH KAH?

Oleh
GRACE LUMBAN GAOL

Setiap kita sebagai manusia sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang setara. Hal ini tertuang dalam *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku di Indonesia. Berangkat dari hukum ini, kita seharusnya dapat sadar hak dan kewajiban sebagai manusia sudah kita miliki sejak lahir, termasuk hak kita untuk mendapatkan waktu untuk beristirahat dan cuti kerja. Perjalanan wisata menjadi salah satu *on-top-list* yang pasti dilakukan saat waktu libur telah tiba. Entah itu kota, desa, gunung, atau pantai, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menikmati waktu libur mereka.

Tak heran jika lokasi wisata selalu dipenuhi oleh banyak pengunjung dari penjuru dunia. Sepanjang tahun 2019, lebih dari 16 juta wisatawan dalam dan luar negeri datang ke Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata dan berlibur. Kenaikan jumlah wisatawan turut mengambil andil besar terhadap perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, banyak diantara masyarakat lokal menyediakan usaha barang dan jasa sebagai bagian dari mata pencaharian sehari-hari. Masyarakat lokal yang turut berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian sektor pariwisata ini tidak hanya digeluti oleh laki-laki, perempuan pun memiliki pengaruh besar di dalamnya.

Hal ini dapat kita lihat dari dominasi perempuan yang memperkaya citra wisata dengan aneka ragam kuliner khas daerah, berjualan kain tradisional, hingga pernak-pernik yang dapat dijadikan buah tangan selepas berwisata. Tanpa sadar, perempuan pun menyebarkan budaya dan bahasa lokal kepada wisatawan.

Di sisi yang tak terlihat, kebanyakan dari mereka menanggung beban ganda - sebagai





seorang ibu mengurus rumah tangga dan bekerja, beberapa diantaranya diusir atau kesulitan untuk berjualan dan beberapa yang lain hanya dapat melakukan pekerjaan domestik karena terikat oleh *stereotype* gender sebagai perempuan. Ini juga terjadi di sisi pengunjung perempuan saat berwisata. Salah satunya, rasa tidak aman dalam mengakses fasilitas publik masih dirasakan oleh perempuan. Padahal aturan mengenai jaminan wisatawan untuk mendapatkan hak perlindungan hukum dan keamanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 20 (c) tetapi kejadian ini masih terus terulang. Menurut catatan Komnas Perempuan, kamar mandi umum merupakan salah satu fasilitas publik yang paling tidak aman. Padahal kamar mandi umum menjadi fasilitas yang

sangat vital bagi pengunjung, khususnya di tempat wisata.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh *Adventure Travel Trade Association* (ATTA) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa sektor pariwisata didominasi oleh wisatawan perempuan dibandingkan wisatawan laki-laki. Dimulai dari yang melakukan solo-traveler hingga yang berkelompok. Namun, fasilitas dan akses yang ditawarkan dalam sektor pariwisata masih kurang ramah dengan kebutuhan perempuan sebagai wisatawan.

Pada beberapa daerah di Indonesia, perempuan dari masyarakat lokal kurang mendapatkan ruang untuk mengutarakan pendapat dan menyatakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebanyakan daripada para perempuan ini masih terikat sistem patriarki

yang ada di tempat mereka tinggal. Hal ini dikarenakan peran dan kontribusi perempuan masih belum dipandang penting sehingga perempuan - wisatawan dan masyarakat lokal - masih belum terwakili di dalam hak-hak mereka pada sektor pariwisata. Lalu, bagaimana situasi mengenai hal ini ditengah pandemi COVID-19?

Sejak tahun 2020, Indonesia telah berada dalam situasi pandemi hingga saat ini. Situasi pandemi memengaruhi jumlah kunjungan wisata yang menurun sebesar 78,84 persen dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Interaksi ekonomi di sektor pariwisata pun turut mengalami hal serupa. Situasi ini tentu tak dapat dihindari dan juga berimbas kepada masyarakat lokal yang tinggal di daerah wisata.

Mati surinya sektor pariwisata semakin memperburuk keadaan. Tentu saja masyarakat tidak dapat diam diri di rumah dan perlu tetap bekerja untuk melanjutkan hidup. Keselamatan hidup dipertaruhkan oleh masyarakat lokal yang sudah bertahun-tahun bertumpu pada sektor pariwisata.

Setelah hampir setahun lebih, Indonesia dapat kembali memulihkan sektor pariwisata dengan mencapai penurunan pada level Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Tak lengah, pemerintah dan aparat terkait terus mensosialisasikan protokol kesehatan saat melakukan perjalanan wisata dan menyediakan fasilitas tambahan seperti *hand sanitizer*, masker medis, dan juga tempat mencuci tangan di titik-titik lokasi tempat wisata. Masyarakat lokal pun sudah mulai Kembali menghidupkan perekonomian dengan kembali berjualan dan menyediakan jasa dalam berwisata.

Namun, pariwisata ramah perempuan masih menjadi gema yang teredam oleh maraknya antusiasme masyarakat untuk bisa kembali beraktivitas secara *offline*. Padahal kasus perempuan yang mengalami perbuatan tidak menyenangkan bahkan pelecehan di ruang publik sebesar 1.902 kasus sampai 3 juli 2021 lalu menurut hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.

Perempuan sebagai wisatawan ataupun sebagai masyarakat lokal seharusnya bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Hak atas keamanan dalam mengakses fasilitas umum, hak untuk dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, dan juga hak untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pariwisata berkelanjutan. Hal ini tentu tidak akan dicapai jika hanya keinginan dari sisi perempuan saja. Setiap elemen perlu memiliki kesadaran bahwa pariwisata tidak hanya perihal keberlangsungan alam tetapi juga perihal keberlangsungan peran perempuan yang menjadi salah satu faktor penting sektor pariwisata di Indonesia.

Meski ada keterbatasan karena pandemi COVID-19, rasa aman ini dapat tetap dilakukan dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka yang bisa dilakukan secara *online*, tempat-tempat wisata dapat diperketat dengan memberikan fasilitas kamera keamanan dibarengi dengan memperketat protokol kesehatan, memberikan pelatihan bagi perempuan untuk dapat memiliki usaha lokal dan mengembangkannya secara *online*, serta tak lupa untuk dapat bisa menghimpunkan laki-laki dan perempuan dari masyarakat lokal untuk bisa saling mendukung dan menolong demi tercapainya pariwisata ramah perempuan dan setara.

Peran kita secara pribadi dalam menghargai perempuan perlu juga dilakukan, seperti menghargai perempuan yang menawarkan produk jualan dengan santun, segera menolong saat melihat kejadian pelecehan atau perilaku kurang menyenangkan terhadap perempuan, dan tentunya mendukung perekonomian masyarakat lokal dengan membeli produk-produk lokal saat berwisata. Dengan begitu, kita dapat menciptakan keberlangsungan pariwisata berkelanjutan, setara dan inklusif tanpa rasa takut sebagai wujud kontribusi kita terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Jawa Timur . Artikel bersumber dari:
<https://berandainspirasi.id/tak-hanya-ramah-lingkungan-pariwisata-ramah-perempuan-sudah-kah>



Para siswa menjahit kain untuk membuat pembalut dalam kelompok.
Foto: **UNICEF/2021/Reza Hendrawan**

TEMUI MANUSIA PEMBALUT DARI PAPUA YANG MENDOBRAK TABU DAN MENGUBAH KEHIDUPAN

Oleh **REZA HENDRAWAN**

Di Tanah Papua, salah satu provinsi termiskin di Indonesia, memiliki budaya patriarki yang kuat sehingga membuat menstruasi menjadi topik pembicaraan yang tabu, terutama di kalangan laki-laki. Tapi Demianus Dike adalah salah satu laki-laki setempat yang berani mematahkan mitos dan kesalahpahaman tentang menstruasi di komunitasnya.

Demianus, atau Demi, bekerja untuk Yayasan Noken Papua, sebuah organisasi non-pemerintah lokal yang berfokus pada pembangunan kesehatan dan pendidikan di Papua. Dalam perannya, ia tidak hanya mendidik masyarakat tentang manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi (MKM) tetapi juga mengajarkan siswa, guru, dan kepala sekolah cara membuat pembalut yang dapat digunakan kembali dari kain. Karena kepiawaiannya, beberapa temannya memanggilnya “Manusia Pembalut dari Papua”.

“Saya mungkin diejek oleh teman-teman saya karena saya berbicara tentang menstruasi,” katanya. “Tetapi saya mengambil risiko ini agar anak perempuan di Papua dapat menyadari hak mereka atas akses kesehatan dan kebersihan di sekolah, bahkan ketika mereka sedang menstruasi.”

Untuk anak perempuan, persediaan dan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan (Sanitasi Sekolah) yang layak merupakan prasyarat penting untuk memastikan partisipasi mereka yang aman dan sehat di sekolah. Tetapi penelitian UNICEF pada tahun 2015 menunjukkan bahwa satu dari enam anak perempuan di Indonesia membolos sekolah saat



menstruasi, seringkali karena kurangnya pembalut dan toilet yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, yang membuat mereka tidak dapat mengelola menstruasi dengan nyaman. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan dukungan dari UNICEF menunjukkan bahwa satu dari tiga sekolah di Indonesia tidak memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Salomina Wally, seorang kepala sekolah di Papua, melihat hal ini sangat memengaruhi anak perempuan di sekolahnya. “Tidak mudah menyediakan pembalut cadangan untuk ratusan siswa perempuan. Alokasi anggarannya terbatas dan masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan,” jelasnya.

Demi prihatin bahwa beberapa anak perempuan di daerah pedesaan di Papua tidak masuk sekolah ketika mereka menstruasi dan ia bertekad untuk mengubah hal ini. Baru-baru ini ia memfasilitasi pelatihan MKM selama tiga hari di Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, UNICEF dan Yayasan Noken Papua. Pelatihan tersebut melibatkan 20 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki dari SD dan SMP se-Kabupaten Jayapura, yang didampingi oleh guru dan kepala

sekolah. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk melatih para siswa menjadi Kader Kesehatan Remaja (KKR), yang akan mendidik teman-temannya tentang MKM di sekolahnya masing-masing.

Selama pelatihan, para siswa, guru, dan kepala sekolah belajar bagaimana membuat pembalut yang dapat digunakan kembali dari kain yang tersedia di lingkungan mereka. Setelah menunjukkan cara membuat pembalut langkah demi langkah, Demi membagi peserta menjadi empat kelompok sehingga mereka bisa berlatih membuat pembalut sendiri. Kelompok-kelompok tersebut tidak saja terdiri dari anak perempuan namun juga laki-laki, sehingga mereka dapat berkolaborasi dan saling bekerja sama.

Di salah satu sudut, Patricia Chesya Pesurnay, siswa SMP “Bonaventur”, dengan antusias memimpin kelompoknya. Dia membagikan tugas kepada teman-temannya, seperti membuat pola, memotong kain, dan menjahitnya.

Meskipun tugas tersebut pada awalnya tampak sulit, semua kelompok berhasil membuat setidaknya tiga hingga empat pembalut kain selama dua jam. Meski kualitas pembalut kainnya tidak sempurna, Patricia dan teman-temannya bangga dan menyatakan



bersedia menggunakan pembalut yang dibuat kelompoknya.

Ibu Wally yang juga mengikuti pelatihan tersebut mengaku bersedia mencoba pelatihan yang sama dengan siswanya. “Saya yakin pembalut yang bisa dipakai berulang kali ini bisa menjadi solusi bagi sekolah kita,” ujarnya penuh percaya diri saat menyampaikan rencana tindak lanjutnya. “Mudah disiapkan, lebih murah, dan ramah lingkungan.” Guru dan kepala sekolah lainnya juga setuju dan mengatakan mereka berencana untuk menerapkan kegiatan MKM di sekolah mereka setelah pelatihan.

Dengan melibatkan siswa laki-laki dan perempuan, Demi berharap para peserta mampu menghilangkan mitos dan stigma yang terus berkembang seputar menstruasi di kalangan anak sekolah. Giston, siswa laki-laki dari Sekolah Menengah Pertama 6 Sentani, mengaku memiliki banyak kesalahpahaman sebelum mengikuti pelatihan. “Anak laki-laki sering mem-bully teman perempuannya saat sedang menstruasi di sekolah,” katanya. “Tapi ini tidak akan terjadi lagi.” Giston mengatakan dia sekarang memahami dampak negatif dari *bullying* pada anak perempuan dan berjanji untuk berbagi pengetahuan barunya dengan teman-temannya.

(Kiri) Giston (di tengah) dan teman-temannya berpartisipasi di kegiatan bermain peran dalam pelatihan MKM (kanan) Para siswa merancang pola di kain sebelum menjahitnya.

Foto: **UNICEF/2021/Reza Hendrawan**

“Menstruasi adalah proses normal bagi anak perempuan, dan mereka harus berada di kelas untuk belajar bahkan ketika sedang menstruasi,” kata Demi. “Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa perempuan di sekolah.”

UNICEF Indonesia telah mengarusutamakan MKM baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran pendobrak tabu di tingkat lokal seperti Demi adalah bukti bahwa laki-laki, khususnya di Papua, dapat memahami pentingnya kesehatan dan kebersihan menstruasi serta membantu anak perempuan mengelola menstruasi dengan aman dan bermartabat. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan, siswa, guru, dan kepala sekolah dapat melakukan kegiatan MKM di sekolahnya sehingga tidak ada lagi anak perempuan yang harus bolos pelajaran saat menstruasi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah WASH Officer Unicef - Papua Program

Artikel ini bersumber dari

<https://www.unicef.org/indonesia/id/cerita/temui-manusia-pembalut-dari-papua-yang-mendobrak-tabu-dan-mengubah-kehidupan>

Oleh
MIZAN BUSTANUL FUADY BISRI

Komunitas peneliti punya peran besar dalam suatu negara-terlebih peneliti muda.

Di Indonesia, misalnya, mereka diharapkan mendukung impian menjadi negara maju pada 2045 melalui pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Mereka juga diharapkan mengatasi beragam isu dari kemiskinan hingga bencana.

Sebagai aktor kunci dunia riset masa depan, penting bagi Indonesia memahami kondisi dan kebutuhan para peneliti muda.

Studi pendahuluan yang saya lakukan bersama The Conversation Indonesia (TCID), misalnya, mencoba memahami karakter peneliti muda serta peluang dan tantangan yang mereka hadapi untuk jadi pemimpin di dunia riset.

Kami mengumpulkan data dan berbicara pada 283 peneliti muda yang bergelar doktor atau sedang menjalani S3.

Mereka berasal dari bidang kelautan, perubahan iklim, kesehatan, dan ketahanan masyarakat, serta memiliki rekam jejak kuat dalam menerbitkan karya akademik.

Pada 2020, kami memperkirakan ada lebih dari 14.000 peneliti muda dari total sekitar 216.000 peneliti di Indonesia.



SEPAK TERJANG PENELITI MUDA INDONESIA: BERKEMBANG PESAT TAPI MASIH TERBENTUR BANYAK TANTANGAN



Foto: Adwit B. Prämono/Yayasan BaKTI

Jumlah mereka pun terus meningkat, dengan kapasitas kolaborasi yang lebih inovatif dan kemampuan berkomunikasi yang jauh lebih lihai.

Namun, studi kami juga menemukan peneliti muda juga menghadapi beragam hambatan untuk berdampak lebih luas bagi dunia riset, dari masalah pendanaan hingga kesetaraan gender.

Berkembang pesat, jago berkomunikasi, dan punya motivasi tinggi

Hasil dari studi kami menunjukkan bahwa peneliti muda di Indonesia memiliki beragam kekuatan dan potensi.

Pertama, dalam empat tema penelitian tersebut, jumlah peneliti muda mengalami peningkatan dari sekitar 2.500 pada 2010 menjadi lebih dari 14.000 pada 2020.

Hal ini terjadi karena ada berbagai skema baru untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Di antaranya skema Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sampai program Manajemen Talenta inisiasi Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN).

Kedua, peneliti muda sangat menyadari pentingnya berjejaring (*networking*) karena membantu memfasilitasi kolaborasi, serta mendobrak sekat antar disiplin ilmu maupun antara sains dan kebijakan.

Banyak peneliti muda, misalnya, aktif memperkuat peran Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Ada yang membentuk jaringan baru termasuk Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia (I4) yang mendorong kerja sama peneliti diaspora dan dalam negeri, maupun *U-INSPIRE* Indonesia yang menjembatani wawasan kebencanaan antara pemangku kepentingan dan aktor penanggulangan bencana.

Selain menghubungkan peneliti dan institusi lintas negara, berbagai jaringan tersebut juga dapat meningkatkan peran sains dalam pembuatan kebijakan.

Ketiga, kami melihat banyak bukti bahwa peneliti muda memiliki kemampuan komunikasi riset yang jauh lebih baik.

Sebelumnya, para peneliti sebatas menyebarkan hasil riset melalui jurnal ilmiah. Saat ini, mereka mulai merambah media sosial, menuliskan opini di media cetak dan *online*, hingga menjadi narasumber di televisi dan radio.

Pada 2021, misalnya, data internal dari TCID menunjukkan 700 peneliti menerbitkan 695 artikel populer di media tersebut – mayoritasnya adalah peneliti muda.

Keempat, studi kami juga menunjukkan bahwa mayoritas peneliti muda memiliki motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin riset di Indonesia yang mendukung inovasi dunia riset.

Banyak peneliti hanya menjual “topik penelitian” dan bukan “nilai manfaat dari penelitian tersebut”

Misalnya, mereka lebih berani mempercepat penyaluran hasil penelitian ke luar “zona nyaman” penelitian (seperti jurnal dan konferensi), termasuk membawa hasil riset mereka untuk memasuki arena politik.

Beragam tantangan jadi peneliti kelas dunia

Namun, para peneliti muda juga menghadapi tantangan terkait pendanaan, budaya penelitian dan lemahnya *mentorship*, hingga kesenjangan gender.

Pertama, di bidang pendanaan, banyak responden kami kesulitan mendapat pendanaan riset yang baik dari negara maupun sumber lain. Ini bisa berupa kebutuhan peralatan riset, langganan jurnal ilmiah, pembiayaan penerbitan, serta dana riset longitudinal (jangka waktu bertahun-tahun).

Pada saat yang sama, bisa jadi para peneliti muda juga kesulitan untuk menghasilkan proposal penelitian yang berkualitas.

Satu informan kunci yang bekerja sebagai penyalur dana riset menggambarkan bahwa pada 2020, hanya 4-7% proposal yang mereka terima layak didanai. Banyak peneliti hanya menjual “topik penelitian” dan bukan “nilai manfaat dari penelitian tersebut”.

Informan lain menyebutkan bahwa di lembaganya, dari 237 proposal yang diterima, hanya 99 yang baik dan hanya 11 yang akhirnya didanai. Mayoritas proposal kolaborasi riset

juga memposisikan peneliti Indonesia hanya sebagai kolaborator dan bukan peneliti utama.

Padahal, para responden peneliti lulusan dalam negeri selama ini telah banyak mengalami kesulitan meraih dana riset kolaborasi akibat terbatasnya relasi, yang sebelumnya sudah terhambat bahasa.

Kedua, dalam diskusi kelompok, peneliti muda juga mengakui bahwa budaya riset yang mendorong hubungan mentorship (pendampingan) masih lemah.

Kajian di jurnal ternama *Nature* menunjukkan *mentorship* yang baik membantu peneliti muda mendapatkan masukan untuk memoles kemampuan memimpin riset. Mentorship mempermudah akses jejaring penelitian yang lebih luas untuk meningkatkan prestise mereka.

Tanpa jejaring, para peneliti akan terisolasi dan bergerak sendiri saat meneliti, menyebarluaskan hasilnya, dan tidak akan dilihat pemangku kepentingan terkait.

Ketiga, responden dalam studi kami juga mengonfirmasi masih adanya masalah kesenjangan gender yang menghambat banyak peneliti muda mengembangkan kapasitas mereka sebagai pemimpin riset.

Hal ini sejalan dengan tren di banyak ranah riset, di berbagai negara.

Riset tahun 2018 yang mengikuti lebih dari 6.000 peneliti internasional, misalnya, menemukan bahwa banyak peneliti perempuan di universitas mengalami hambatan perkembangan karir antara fase pasca-doktoral hingga lektor kepala (associate professor).

Peneliti perempuan juga beralih jadi peneliti utama dalam riset dengan laju yang lebih rendah dari peneliti laki-laki (hingga 20% lebih lambat).

Di Indonesia, ini semakin diperparah oleh budaya kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) yang masih lemah.

Keempat, responden kami merasa bahwa sistem insentif untuk kegiatan riset mereka masih bias dan kurang mendukung.

Bagi peneliti muda di perguruan tinggi, misalnya, sistem angka kredit yang ada sekarang memberikan beban lebih pada tugas mengajar – dari menyusun materi kuliah hingga evaluasi hasil belajar mahasiswa – ketimbang memproduksi riset.

Butuh dukungan ‘horizontal’ dan ‘vertikal’

Melihat potensi dan tantangan yang dihadapi peneliti muda Indonesia, perlu lebih banyak dukungan bagi mereka untuk mengembangkan kapasitas secara ‘horizontal’ dan juga ‘vertikal’.

Secara horizontal, kebanyakan peneliti muda sebenarnya telah mendapatkannya dalam bentuk pendidikan dan pengalaman dari pekerjaan riset mereka. Secara akademik, mereka sudah memperoleh kepakaran dalam bidang sains masing-masing.

Namun untuk pengembangan vertikal, peneliti muda masih kurang dukungan.

Mereka membutuhkan bantuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan riset yang kompleks-dari kelincahan menghadapi ekosistem penelitian Indonesia yang dinamis, hingga memimpin kolaborasi yang lebih luas dengan banyak pihak secara strategis.

Pengembangan vertikal ini tidak dapat dilakukan secara instan melalui pelatihan.

Peneliti muda membutuhkan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Ini dapat berupa mentorship yang terarah, pendampingan untuk kolaborasi riset, atau beragam program *fellowship*.

Kedua jenis dukungan di atas, baik horizontal maupun vertikal, akan mendukung peneliti muda untuk memiliki kompetensi pemimpin riset yang matang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Assistant Professor pada Kobe University

Artikel bersumber dari: <https://theconversation.com/sepak-terjang-peneliti-muda-indonesia-berkembang-pesat-tapi-masih-terbentur-banyak-tantangan-174408>

SATU DATA INDONESIA

TERGANJAL KEBERAGAMAN, DISINTEGRASI DAN EGOSEKTORAL SUMBER DATA

Oleh
**NURHADI PRASETYO ST &
AYU PUTU EKA NOVITA SP, MM**

**“Data adalah jenis kekayaan
baru bangsa kita, kini data
lebih berharga dari minyak”**

Presiden Joko Widodo,
Pidato Kenegaraan di Depan Sidang Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
pada 16/98/2019



Sejumlah Kebocoran Data terjadi di Indonesia seperti menghantui, karena rentannya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi. Siapakah yang bertanggungjawab?

Pada Maret 2019 Peretas *Gnosticplayers* mengklaim menjual 13 juta data akun pengguna dari Bukalapak. Pihak Bukalapak menyatakan peretas gagal menembus sistem keamanan mereka. Mei 2020, 91 Juta data pengguna dan 7 Juta data penjual di Tokopedia diduga bocor, Mei 2020 juga 2,3 Juta data pribadi Warga Negara Indonesia dari daftar Pemilu 2014 diduga



berhasil diretas dari situs KPU, Agustus 2020 Data sekitar 890 ribu nasabah perusahaan tekfin Kreditplus diduga bocor dan dijual di RaidForum. Selanjutnya pada September 2020 Data Pribadi sekitar 5,8 Juta pengguna aplikasi RedDoorz di Indonesia dijual, April 2021 data pribadi sekitar 130 ribu pengguna Facebook di Indonesia diduga bocor dan disebar di sebuah



Foto: Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

situs peretas amatir, Mei 2021 Data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di RaidForum dengan harga sekitar Rp. 84 Juta.

Hingga Juli 2021 Data Nasabah BRI Life Bocor, Kominfo diminta asesmen menyeluruh, Irine Yusiana Roba Putri (Anggota Komisi I DPR RI), “Dalam kasus kebocoran data, asesmen, dan

langkah evaluatif yang cepat dan transparan adalah keharusan”, bahkan hingga saat ini belum juga ada laporan atau asesmen dari Kominfo kepada publik tentang dampak 279 juta data peserta BPJS dan tidak boleh terjadi juga pada kasus BRI Life dan harus ada transparansi dari otoritas dalam hal ini Kementerian Kominfo.

Otoritas Siapakah berkenaan dengan Data?

Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan *stakeholder* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan *Index Readiness* Indonesia dan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.

Data berkualitas adalah data yang dapat memfasilitasi kebutuhan Kementerian dan Lembaga, Organisasi Masyarakat dari Pusat dan Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menyelenggarakan acara yang penting ini di tengah munculnya tantangan-tantangan dalam tata kelola Data Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengatur mengenai perbaikan Tata Kelola (*Governance*) Data di Kementerian/Lembaga Instansi Pusat, OPD Instansi Daerah, hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Satu Data Indonesia mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia sehingga data tidak tumpang tindih dan tetap terjaga Integritas serta meta datanya di tingkat pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan Tata Kelola Data Pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar *stakeholders*. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Pidato Kenegaraan pada tahun 2019 Presiden Jokowi telah menyampaikan pentingnya data, bahwasannya data merupakan jenis kekayaan baru bangsa ini, karena kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga kesadaran akan pentingnya data harus dibangun sejak dini baik

Kunci semua upaya dalam Satu Data Indonesia adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholders Satu Data Indonesia baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pengawalan implementasi SDI secara nasional oleh Publik.

di sisi pemerintah maupun masyarakat secara luas. Perpres 39/2019 ini akan terbangun kesadaran tentang penggunaan data yang lebih luas. Seperti misalnya kalau data tentang kemiskinan, data sebaran, kedalaman, dan keparahan kemiskinan secara statistik.

Dengan adanya Satu Data Indonesia kita diharapkan juga bisa menganalisa data spasialnya, di mana saja sebarannya, bagaimana interaksi antar wilayah, dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa mengaitkan analisa data statistik dan spasial tersebut. dengan data keuangan negara, baik data APBN dan APBD. Seberapa banyak program kemiskinan yang ada di berbagai K/L/D dan seberapa besar dana yang dikucurkan untuk program kemiskinan tersebut. Kesatuan analisis tentang data statistik, data spasial, data keuangan akan menghasilkan hasil yang lebih akurat dan menjadi pengambilan kebijakan yang lebih baik. Apalagi nanti kalau *Big Data* sudah disediakan di SDI. Semua jenis data tersebut, yaitu data statistik, data spasial, data keuangan negara, dan *Big Data* diharapkan nanti bisa disediakan di portal Satu Data Indonesia.

Di tengah pandemi COVID-19, data memegang peran penting dalam perumusan

kebijakan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Maka dari itu, salah satu program prioritas Satu Data Indonesia adalah merumuskan Daftar Data Prioritas yang diambil dari Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional, *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta arahan Presiden yang bersifat mendesak. Tahun ini Daftar Data Prioritas yang disepakati pada Forum Satu Data Indonesia meliputi; (1) data untuk Indikator dari Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); (2) Basis Data Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta (3) Basis Data Program Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi, serta Program Nasional lainnya.

Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia pada ketiga data di atas, dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan *stakeholders* terkait; misalnya dibentuk gugus tugas Satu Data Indonesia Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi yang terdiri dari; Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta *stakeholders* lainnya. Dengan visi yang sama, yaitu mewujudkan Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara berdasarkan SDI, pemerintah berupaya mendukung terciptanya data yang akurat, tidak tumpang tindih dan *redundant*, mutakhir, serta dapat dibagipakaikan antar *stakeholders*.

Untuk mendukung terciptanya Basis Data Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM), Kementerian PPN/Bappenas bersama jajaran Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan *stakeholders* lainnya berupaya penuh melakukan identifikasi data terkait UMKM. UMKM memegang peran penting sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia yang telah menjadi sumber dari dinamika ekonomi nasional dan kunci penyerapan angkatan kerja nasional.

Kunci semua upaya dalam Satu Data Indonesia adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh *stakeholders* Satu Data Indonesia baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pengawasan implementasi SDI secara nasional oleh Publik. Dari sisi jumlah kelembagaan yang terlibat sangat besar dalam Satu Data Indonesia ini. Jumlah walidata seluruh Indonesia di K/L/D lebih kurang 630 unit, jumlah walidata pendukung yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota bisa mencapai hampir 20.000 walidata pendukung. Belum lagi jumlah produsen data yang bisa terdapat 2-3 produsen data di masing-masing OPD, bisa mencapai 60.000 produsen data. Itulah perlunya kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah perwujudan Mimpi Bangsa Indonesia terhadap kebutuhan Data Yang berkualitas, *Big Data is Big Dream*, sehingga apapun yang dibutuhkan mengenai keterwakilan data yang terintegrasi dapat terwujud dengan sinerginya semua pendataan dalam Satu Data Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Nurhadi Prasetyo ST adalah Manajer Komunikasi SDI dan Ayu Putu Eka Novita SP, MM adalah Staf Direktorat Agama Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi penulis melalui email ayu.eka@support.bappenas.go.id

MANUSIA ADALAH KUNCI MELAWAN KRISIS IKLIM

Oleh
**SAKINAH UMMU HANIY,
DEWI R. SARI &
MUHAMAD RIZKI**

Laporan IPCC terbaru (2021) menegaskan bahwa emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk karbon dioksida (CO₂), merupakan pendorong utama perubahan iklim yang menyebabkan reaksi berantai seperti cuaca ekstrim, peningkatan permukaan air laut, dan bencana alam seperti kekeringan serta banjir. Emisi GRK global yang telah meningkat sebesar 43% dalam dua dekade terakhir, atau di tahun 2018 setara 51,8 miliar ton CO₂ ekuivalen, mengindikasikan kemungkinan krisis iklim yang lebih buruk akan terjadi lebih cepat.

Di sisi lain, laporan IPCC juga menyatakan bahwa tindakan manusia dapat menentukan arah iklim di masa depan. Hal ini tentunya memberi secercah harapan bahwa setiap tindakan, aksi, dan langkah yang diambil oleh

setiap individu berperan penting untuk mengurangi emisi CO₂ dan menentukan arah perubahan iklim ke depan.

Aplikasi EMISI hadir untuk memberikan panduan, pilihan, dan *platform* yang membantu setiap individu maupun organisasi untuk menghitung, mengurangi, dan beraksi menyerap dampak emisi GRK yang dihasilkan dari gaya hidup kita. Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2020 lalu, aplikasi EMISI diluncurkan dengan fitur perhitungan emisi dari sektor transportasi darat dan penyerapan emisi oleh pohon. Di tanggal yang sama tahun ini, EMISI kembali hadir dengan tambahan empat fitur perhitungan emisi GRK, yaitu: konsumsi makanan, pembelian pakaian, penggunaan alat elektronik, dan sampah yang dihasilkan sehari-hari.

Mengapa penambahan empat fitur terbaru ini penting untuk melawan krisis iklim?

Emisi GRK dari konsumsi makanan

Konsumsi makanan diperkirakan bertanggung jawab atas 10,2–17,4 GtCO₂e pada 2010 atau sebesar 28% emisi global di semua

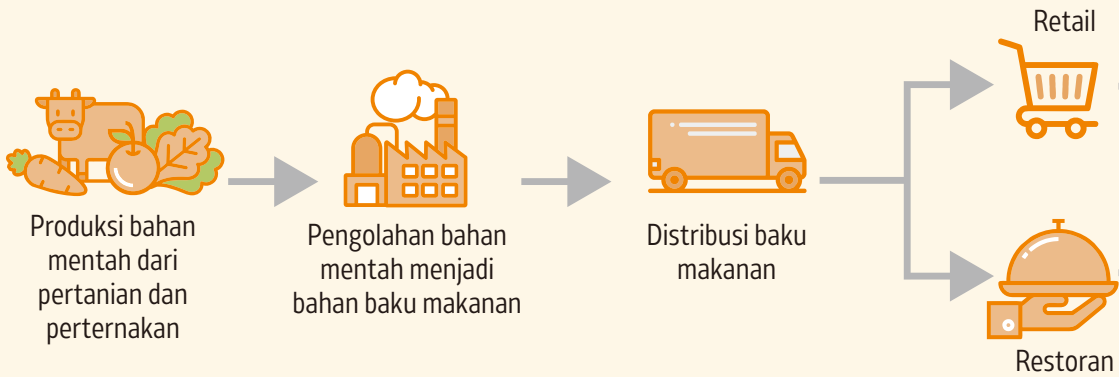


sektor, dengan kontribusi konsumsi produk hewani sebesar 62% atau sekitar 6,1–10,9 GtCO₂eq dari jumlah total emisi GRK dari makanan. Estimasi tersebut mencakup semua kegiatan produksi makanan, mulai dari pertanian, energi yang digunakan, produksi bahan kimia dan mineral, penggunaan lahan dan alih fungsi lahan dan hutan, hingga sampah yang dihasilkan dalam proses produksi bahan makanan, sekaligus emisi GRK dari distribusi bahan makanan tersebut. Emisi GRK dari makanan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia, namun setiap individu dapat berperan dalam menurunkan permintaan konsumsi makanan dengan cara membeli makanan secukupnya sehingga tidak ada makanan yang terbuang atau rusak sebelum dikonsumsi.

Emisi GRK dari pembelian pakaian

Sama seperti makanan, produksi pakaian juga menghasilkan emisi GRK dalam setiap tahapan produksinya, mulai dari ekstraksi bahan baku, pembuatan pakaian, hingga penjualan pakaian tersebut. Industri pakaian bertanggung jawab atas 10% emisi karbon global tahunan, atau setara dengan gabungan semua penerbangan internasional dan pelayaran laut per tahun. Dengan laju pembelian pakaian saat ini, emisi GRK dari industri pakaian dapat melonjak menjadi 50% pada tahun 2030. Oleh karena itu, untuk menekan laju emisi GRK dari industri pakaian ini, setiap individu diharapkan lebih bijak dalam memilih dan membeli pakaian.

Ilustrasi dari Proses Produksi hingga Makanan Dikonsumsi



Sumber: Penulis

Emisi GRK dari penggunaan listrik

Sebagian besar sumber energi listrik dunia masih bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil mulai dari batu bara, minyak, dan gas. Seiring dengan peningkatan populasi, kebutuhan energi listrik diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga emisi CO₂ yang dihasilkan dari sektor ini juga terus meningkat. Padahal, sektor konsumsi listrik saat ini telah menyumbang hampir dua pertiga dari pertumbuhan emisi CO₂. Bahkan, pada tahun 2018, emisi CO₂ dari energi meningkat sebesar

1,7% dan menjadi kenaikan emisi CO₂ dari sektor energi tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 33,1 Gt CO₂ setara dengan 44 kali emisi negara Jerman. Penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik saja telah melampaui 10 Gt CO₂, sebagian besar di Asia termasuk Indonesia. Setiap individu dapat mengurangi emisi GRK yang dihasilkan dari pembangkit listrik dengan cara menghemat penggunaan listrik dan menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Hal ini diharapkan dapat menurunkan permintaan energi yang berujung pada

Ilustrasi dari Proses Produksi hingga Pakaian Dikonsumsi

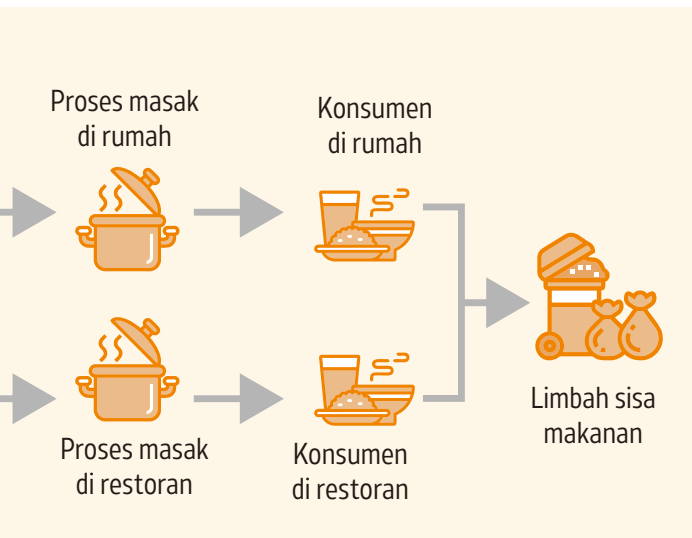
TINGKAT 4	TINGKAT 3	TINGKAT 2	TINGKAT 1	TINGKAT 0
EKTRAKSI BAHAN METAH	PROSES BAHAN METAH	PRODUKSI BAHAN PAKAIAN	PRODUKSI PAKAIAN	KANTOR, RITEL DAN PUSAT DISTRIBUSI
Budidaya bahan baku dan ekstraksi dari alam, tumbuhan atau hewan	Pengolahan bahan mentah menjadi benang atau bahan baku lainnya yang digunakan dalam produksi pakaian	Produksi dan penyelesaian produksi bahan pakaian(kain, trim) menjadi produk jadi	Pembuatan produk akhir (pakaian) melalui proses penjaitan bahan pakaian	Distribusi oleh perusahaan - perusahaan pakaian kepada pembeli



LOGISTIK

Pengiriman bahan dan produk di seluruh rantai nilai

Sumber: Sadowski et al. 2019.



pengurangan konsumsi bahan bakar pada pembangkit listrik yang tinggi karbon.

Emisi GRK dari produksi sampah rumah tangga

Emisi GRK yang dihasilkan dari sampah rumah tangga berkontribusi sebesar 5% dari total emisi GRK global. Emisi dari sektor ini bergantung pada tahapan cara pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, daur ulang, pembuangan, dan penimbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).



Di Indonesia, 60–70% sampah yang dihasilkan diangkut ke TPA, sedangkan 30–40% sisanya berakhir di sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat. Cara pengelolaan sampah yang bergantung pada pembuangan ke TPA ini menyebabkan kontribusi emisi GRK dari pengelolaan sampah Indonesia yaitu sebesar 8% atau setara 134 MtCO_{2e}, dimana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan emisi dari pengelolaan sampah secara global pada tahun 2018.

Oleh karena itu, cara pengelolaan sampah perlu ditingkatkan agar seminimal mungkin sampah yang berakhir di TPA. Caranya, bisa dengan meningkatkan upaya daur ulang, kompos, memanfaatkan sampah sebagai sumber energi dengan teknologi insinerator dan cara-cara lainnya. Setiap individu memiliki peran dalam menentukan bagaimana sampah yang dihasilkan sehari-hari dapat dikelola dengan baik dan menurunkan emisi GRK dari sektor ini.

Dengan fitur untuk menghitung, mengurangi, dan menyerap emisi dari sektor transportasi darat, makanan, pakaian, listrik, dan limbah, aplikasi EMISI versi terbaru ini diharapkan dapat membantu siapapun untuk mengetahui dampak emisi GRK yang mereka hasilkan secara lebih transparan namun ilmiah, mudah dijangkau, dan atraktif dari berbagai aspek gaya hidup yang dipilih, sekaligus membantu kita memilih gaya hidup yang lebih rendah emisi dan berpartisipasi melawan krisis iklim.

Saat ini aplikasi EMISI sudah bisa diunduh secara gratis di *Play Store* (Android) dan *App Store* (iOS). Ke depannya, EMISI berencana untuk menambahkan fitur lainnya yaitu perhitungan emisi GRK dari transportasi udara, laut, dan pengiriman barang. Selain itu, EMISI juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan sangat terbuka kepada masukan atau saran dari masyarakat Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari: <https://wri-indonesia.org/id/blog/manusia-adalah-kunci-melawan-krisis-iklim-aplikasi-emisi-versi-terbaru-bisa-membantu>



MEMBINCANG KEMBALI TOLERANSI DAN INTOLERANSI

Oleh **REYNALDI ADI SURYA**

Istilah toleransi belakangan ini nampaknya sangat familiar. Kata ini juga sering digunakan di berbagai forum seminar bahkan di media sosial. Sekalipun orang sering menulis kata toleransi ini di akun pribadinya, baik untuk tulisan pribadi atau polemik di kolom komentar.

Terminologi seperti toleransi, Pancasila, kerukunan, nampaknya dewasa ini sudah menjadi mantra ajaib untuk meyakinkan orang atau bisa juga menjadi semacam 'bumbu penyedap' dalam retorika yang dibawakan oleh tokoh politik di muka umum.

Saya ingat betul ketika Pilpres 2019 berlangsung, istilah toleransi, radikalisme, Pancasila adalah kalimat yang selalu diusung oleh tiap politisi yang ingin mendapat simpati dari masyarakat. Bablasnya, pasca pilpres, terma toleran dan intoleran sering dilontarkan untuk memojokkan lawan politik atau orang yang tak sepaham dengan garis politik pemerintah.

Pada satu sisi, kita sepakat bahwa toleransi adalah terma positif. Istilah ini merujuk pada sikap moderat, tenggang rasa, dan lapang dada. Namun, yang mungkin menjadi aneh dalam perpolitikan kita belakangan istilah ini toleransi itu sendiri bukan lagi sebagai kata sifat yang mencerminkan perilaku, tetapi predikat untuk kelompok tertentu yang memiliki garis sepaham dengan pemerintah yang kebetulan tengah konsen mengkampanyekan program deradikalisasi.

Kelompok yang menyebut dirinya toleran, justru mencap pihak lain sebagai intoleran dan belakangan muncul identifikasi lagi untuk menyebut kelompok intoleran ini, seperti kampret, kadal gurun (kadrin), sumbu pendek, pentol korek, radikal dan istilah lainnya yang sering diketik di kolom komentar Facebook atau Twitter.

Mengidentifikasi Intoleran

Jika kita membaca kamus untuk memahami istilah toleransi dan intoleransi, mungkin secara mudah kita akan mengerti bahwa toleransi merujuk pada sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian atau pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Sedangkan intoleransi adalah kebalikan dari makna di atas. (KBBI, 1992)

Namun, dalam kenyataan politik dan sosial, membedakan kelompok toleransi dan intoleransi jauh lebih sulit ketimbang hanya berhenti pada pemahaman definitif. Dalam artikel ini, penulis agak 'menantang' sidang pembaca untuk menarik pembeda mana kelompok toleran dan intoleran. Sebab pada realitas masa kini, kelompok yang mengaku diri toleran bahkan bisa lebih intoleran ketimbang kelompok yang diidentifikasi sebagai intoleran, contoh pertama adalah mengenai penangkapan Bahar bin Smith yang belakangan tersandung kasus provokasi dan berita bohong yang dicalatkannya. Dalam beberapa rekaman ceramahnya, Bahar memang terkenal keras baik suara maupun isi penyampaiannya yang tak jarang membuat orang tersinggung.

Memang jika dilihat dari muatan ceramahnya, Bahar bin Smith terkesan intoleran karena kerap blak-blakan dan mengutuk seseorang atau satu kelompok secara lugas dan keras. Namun, terkait dengan penangkapan dan pemenjaraan dirinya, apakah tindakan pemerintah bisa dikatakan toleran karena membungkam intoleran? Atau pihak yang memaksa Bahar untuk ditangkap juga intoleran karena tak mentolerir pandangan dan kelakuan Bahar bin Smith?

Baiklah, jika Bahar bin Smith dicap intoleran karena ucapan provokatifnya pada pemerintah dan juga kerap memaki pandangan orang lain, bagaimana kita menempatkan Ferdinand Hutahaean, tokoh politik pendukung pemerintah yang belakangan ditangkap karena cuitannya di media sosial menyakiti perasaan umat beragama? Apakah Ferdinand bisa diidentifikasi sebagai intoleran? (Pedomantangerang.com, 08/01/2022)

Contoh lainnya adalah video yang viral tahun lalu, yaitu terkait dengan para santri yang menutup telinga di sebuah ruangan ketika alunan musik disetel oleh pengelola tempat. Banyak warganet bahkan politisi menyebut perilaku santri tersebut mencerminkan sikap kelompok intoleran yang anti musik.

Namun, sejumlah tokoh yang dijuluki 'toleran' seperti Alissa Wahid mengancam label intoleran kepada para santri yang menutup telinga dari musik. Alasannya adalah para santri tersebut adalah para huffaz (para penghafal Qur'an) yang secara tradisi dijauhkan dari musik. Dalam konteks ini saja sudah terlihat bahwa labelisasi intoleran dan toleran belakangan ini sangat bias karena didasarkan pada sentimen politik. (Detik.com, 16/09/2021)

Paradoks Toleransi

Jika kita menengok pandangan Karl Popper dalam *The Open Society and Its Enemies*, kita akan menemukan terma 'paradoks toleransi' di mana Karl Popper mengatakan pemahaman toleransi juga bisa disebut intoleran karena secara tegas mendukung penindasan kelompok intoleran. (Popper, 2013)

"Hal yang tidak banyak diketahui adalah paradoks toleransi: Toleransi tak terbatas akan memicu hilangnya toleransi. Apabila toleransi tak terbatas juga diberikan kepada kelompok intoleran, apabila kita tidak siap mempertahankan masyarakat toleran dari serbuan kelompok intoleran, maka kelompok toleran akan hancur bersama toleransi itu sendiri."

Dalam penutup kalimatnya, Karl Popper mendukung tindakan keras yang dilakukan pemerintah untuk membungkam kelompok intoleran yang dianggap mengganggu iklim toleransi dalam suatu masyarakat.

Mungkin prinsip Popper ini yang digunakan oleh salah satu kelompok yang sangat keras dan sepakat pemenjaraan pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai intoleran. Namun, paradoks tetap paradoks. Jika hal tersebut dilakukan, maka hal ini sama saja kelompok intoleransi satu melawan kelompok intoleransi lainnya.

Pun yang menjadi pekerjaan rumah adalah, tidak adanya tolak ukur yang jelas untuk mengidentifikasi kelompok lain sebagai intoleran. Sebab yang menjadi tolak ukur saat ini adalah, mereka yang toleran adalah kelompok yang setia pada pemerintah dan koalisinya, sedang oposisi dicap sebaliknya karena berlaku keras dalam mengkritik pemerintah.

Tanpa berniat untuk menyudutkan pihak manapun, akan sangat baik jika kita tidak mudah menjustifikasi dan mengidentifikasi kelompok manapun sebagai intoleran jika tolak ukurnya adalah sentimen politik yang bersifat relatif.

Mereka yang mendeklarasikan diri sebagai toleran akan sangat baik jika memandang secara objektif dan lebih legowo dalam menilai kelompok lain, pun terhadap kelompok yang selalu bersikap kritis terhadap gagasan kebebasan, feminisme dan demokrasi.

John Rawls, filsuf Amerika terkemuka, menegaskan bahwa dalam bertoleransi, masyarakat harus menerima mereka yang menganut intoleransi, sebab jika tidak, maka masyarakat tersebut juga disebut intoleran. Ini yang dikatakan John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (Rawls, 2011)

Namun dalam hal ini perlu dicatat, bahwa ada syarat-syarat di mana kaum intoleran sudah tak bisa mendapat haknya, yaitu ketika mereka sudah bergerak mengangkat senjata atau secara terang-terangan melakukan intimidasi kepada kelompok lain.

Peristiwa penendangan sesaji di lokasi gunung Semeru oleh seorang pria tak dikenal merupakan bentuk intoleransi yang harus diadili dan diberantas, sebab tindakan pria tersebut sudah secara nyata mengganggu keharmonisan masyarakat dan mengintimidasi kelompok agama lain.

Pun dalam menilai Bahar bin Smith atau Ferdinand Hutahaean, akan lebih bijak jika kita tidak mudah menjustifikasi, selama tidak ada tindakan nyata yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Jika mereka berkomentar secara keras dan membuat hati panas, anggap saja itu sebagai pandangan pribadi mereka, tanpa harus dibawa ke meja hijau atau jeruji penjara.

Sebaiknya, kita lepas sekat-sekat sentimen dan pengelompokan 'toleran' dan 'intoleran' hanya karena perbedaan masalah politik. Sikap toleran lebih diutamakan ketimbang mendeklarasikan diri sebagai toleran. Lebih baik menyeduh kopi sembari menghisap rokok, ketimbang marah-marah ketika menghadapi pandangan yang berbeda dengan kita.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://suarakebebasan.id/membincang-kembali-toleransi-dan-intoleransi/>



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**

Bahasa Isyarat
Perekat Teman Tuli dan Teman Dengar

Host
Victoria Ngantung

Bersama
Bambang Ramadan
Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatiri) Sulawesi Selatan

Jumat, 2 Oktober 2020 14.00-15.00 WITA

Bahasa Isyarat: Perekat Teman Tuli dan Teman Dengar

Tahukah Anda kalau tanggal 23 September telah ditetapkan oleh PBB dan World Federation of the Deaf (WDF) sebagai Hari Bahasa Isyarat. Memperingati Hari Bahasa Isyarat diharapkan dapat menjadi ajang pengenalan bahasa isyarat tangan agar semakin dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki status yang sama dengan bahasa yang kita ucapkan.

Perbincangan kami bersama Bambang Ramadan (Teman Tuli) tentang bagaimana Bahasa Isyarat menjadi perekat antara teman dengar dan teman tuli, sekaligus membuat lebih banyak orang peduli dengan teman tuli di Indonesia dan seluruh dunia.

Rumah Rehabilitasi
bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan

Host
Luna Vidya

Bersama
Husnawati
Direktur Rumpun Perempuan Sultra

Rabu, 7 Oktober 2020 14.00-15.00 WITA

Rumah Rehabilitasi bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan

Sejak 2017 Rumpun Perempuan Sultra bekerja sama dengan Polres Kota Kendari menggagas Rumah Rehabilitasi, sebagai bentuk upaya untuk mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari yang semakin tahun meningkat jumlahnya. Rumah Rehabilitasi memberikan kenyamanan ruang gerak korban kekerasan, memberikan layanan ramah perempuan dan anak yang mudah diakses masyarakat tanpa dipungut biaya.

Berbagi Pengetahuan Lewat Bukuntukpapa

Bersama
Dayu Rifanto
Pendiri Bukuntukpapa

Host
Victoria Ngantung

Jumat, 9 Oktober 2020 14.00-15.00 WITA

Berbagi Pengetahuan Lewat Bukuntukpapa

Bukuntukpapa sebuah inisiatif crowdfunding pendidikan untuk membangun perpustakaan komunitas, warga dan sekolah di Tanah Papua. Menggalang donasi ke lebih dari 40 inisiatif ruang baca di berbagai tempat di Tanah Papua. Selain itu, aktif melakukan kampanye literasi untuk menyebarkan gagasan literasi, pelatihan, sharing untuk peningkatan kapasitas SDM dan penerbitan buku bacaan khusus konteks Papua.

Diskusi bersama Bukuntukpapa bercerita bagaimana mereka memfasilitasi minat baca warga yang terkendala kurangnya akses buku dan mendorong semua stakeholders melihat pentingnya peduli literasi di Papua.

Artikel

Membuka Pintu Akses dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia

Pertanian dan kehutanan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, banyak masyarakat yang bergantung pada hutan dan lahan pedesaan untuk mata pencaharian pertanian, termasuk banyak masyarakat adat, lebih miskin daripada angka rata-rata nasional. Di antara rumah tangga desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan, 1,7 juta dari 9,2 juta tergolong berpenghasilan rendah, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017. Di masa lalu, lahan hutan yang disediakan oleh pemerintah tidak terdistribusi secara merata antara sektor swasta dan masyarakat, yang mengakibatkan terbatasnya akses bagi rumah tangga desa, konflik penguasaan lahan, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan.

- <https://batukarinfo.com/komunitas/articles/membuka-pintu-akses-dan-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-di-indonesia>

Berita Terbaru

Applications Open for Australia Awards Scholarships

Do you want to be a leader in your field and join an inspiring network of changemakers? Apply now for an Australia Awards Scholarship. The applications open on 1 February 2022 and close on 29 April 2022 at 20.59 WIB.

The Australia Awards Scholarships are prestigious international scholarships that provide emerging leaders with a world-class education in Australia. This year, Australia Awards prioritise Indonesians seeking to make a difference in their home country and undertake Master's or Doctoral degrees supporting the COVID-19 Development Response Plan priority areas, such as Health Security, Stability and Economic Recovery.

- <https://batukarinfo.com/news/applications-open-australia-awards-scholarships-o>

Referensi



Peran Distrik Dalam Model Sinergi Perencanaan

Buku ini adalah seri keempat dari rangkaian dari seri produk pengetahuan model sinergi perencanaan. Buku Peran Distrik dalam Model Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan” menjelaskan dan menuntun pemerintah distrik untuk melakukan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam konteks pelaksanaan model sinergi perencanaan. Konteks ini diberikan untuk memberikan gambaran sekaligus panduan yang aplikatif tentang peran dan tugas distrik dalam hal pembangunan wilayahnya.

- <https://batukarinfo.com/referensi/peran-distrik-dalam-model-sinergi-perencanaan>